

**ANALISIS KINERJA KEPALA DAERAH BERLATAR BELAKANG
PENGUSAHA:
WUJUD REFORMASI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

MUHAMMAD WILLIAMS RAHADITAMA

B 200 080 224

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

**ANALISIS KINERJA KEPALA DAERAH BERLATAR BELAKANG PENGUSAHA:
WUJUD REFORMASI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh :

MUHAMMAD WILLIAMS RAHADITAMA

B 200 080 224

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2012

Pembimbing Utama,

Co Pembimbing,



(Banu Witono, SE, M.Si, Ak.)



(Shinta Permata Sari, SE)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi UMS,



(Dr. H. Triyono, M.Si.)

ANALISIS KINERJA KEPALA DAERAH BERLATAR BELAKANG PENGUSAHA: WUJUD REFORMASI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Muhammad Williams Rahaditama / NIM B200080224

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang kinerja Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga untuk menilai kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibandingkan dengan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Di Jawa Tengah terdapat 35 Kabupaten dan Kota, sedangkan D.I. Yogyakarta memiliki 5 Kabupaten dan Kota. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *judgement sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji *Independent Sample t-test*. Selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah kedua dengan membandingkan nilai *mean* dari masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang ditinjau dari pertumbuhan PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM. Hasil dari uji t dari semua variabel menunjukkan nilai *p-value* diatas $> 0,05$ (α) sehingga semua H_0 diterima dan hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung secara statistik. Namun pada rumusan masalah kedua, diperoleh hasil Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan dan IPM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *mean* yang dimiliki Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih besar dibanding non-pengusaha, terkecuali *mean* variabel tingkat kemiskinan.

Kata kunci: *kinerja kepala daerah, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto*

A. Pendahuluan

Perubahan di sektor publik diawali dengan penerapan *New Public Management (NPM)* di Inggris sebagai pemula *tren* perubahan sistem administrasi publik yang kemudian menginspirasi berbagai negara di Eropa, Asia, dan Afrika melakukan perubahan manajemen sektor publik (Hood, 1991). Sementara itu, Amerika Serikat juga telah melakukan reformasi sektor publik di elemen pemerintahannya dengan mengungkap konsep *reinventing government* yang diusulkan oleh David Osborne pada 1992.

Konsep NPM dan *reinventing government*, pada dasarnya sama-sama mengusung bagaimana “mewirauahakan birokrasi” yang lebih berorientasi pada *output* sehingga lebih efektif dan efisien. Christopher Hood (1991) mengungkapkan tujuh doktrin NPM yang terdiri dari: profesionalisme dalam manajemen sektor publik, standar dan pengukuran yang jelas terhadap kinerja, perhatian lebih terhadap kontrol *output*, pemecahan unit-unit kerja (*disaggregation unit*) di organisasi sektor publik, perubahan menuju peningkatan kompetisi sektor publik, mengadopsi gaya manajemen swasta di sektor publik, dan lebih berdisiplin dan berhemat dalam penggunaan sumber daya.

Kedua konsep yang telah dijelaskan sebelumnya secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan inspirasi bagi reformasi sektor publik di Indonesia. Walaupun NPM dan *reinventing government* tidak secara detail diterapkan di Indonesia, namun hal tersebut telah mengilhami perubahan manajemen sektor publik dari yang sebelumnya tradisional menuju lebih modern. Hal tersebut ditunjukkan melalui Undang-Undang (UU) otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah berlaku di Indonesia. Titik berat otonomi daerah terletak di daerah tingkat kabupaten/kota (UU No.32 Tahun 2004). Selain itu juga keluar produk UU No.13 tahun 2003 yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 22 tahun 2007 yang mengatur tentang mekanisme baru pemilihan Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah mulai dari Gubernur dan Bupati/Walikota dapat secara langsung dipilih oleh rakyat.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang baru tentang pemilihan Kepala Daerah tersebut, memungkinkan berbagai kalangan mulai dari pengusaha, birokrat, teknokrat, ataupun militer untuk mencalonkan dirinya menjadi Gubernur maupun Bupati/Walikota. Akan tetapi, muncul fenomena yang menarik yaitu banyak dari kalangan pengusaha yang mencalonkan dirinya dan terpilih menjadi Kepala Daerah. Diantaranya adalah, Ir. Fadel Muhammad (mantan Gubernur Gorontalo), Ir. Joko Widodo (Walikota Solo), Herry Zudianto (Walikota Jogjakarta), dan masih banyak lagi.

Sejalan dengan pendapat Van Mierlo (1996) bahwa timbulnya konsep wirausaha sebagai karakteristik di organisasi sektor publik memiliki hubungan dengan faktor sosiologis atau *sociological rule-concept*.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai reformasi sektor publik menunjukkan hasil bahwa transformasi nilai-nilai sektor swasta kedalam sektor publik

memberikan dampak positif bagi kinerja Pemerintah. Penelitian Hoque dan Moll (2001) menjelaskan bahwa Australia telah menerapkan reformasi di bidang sektor publik dengan membuat kebijakan yang dinamakan *national competition policy* (NCP). Dengan penerapan NCP, maka entitas sektor publik harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip komersial yang sama dengan sektor swasta, sehingga mereka dituntut untuk menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Begitupula dengan Greilling (2005) mengungkapkan bahwa Pemerintah Jerman pun banyak mengkaji tentang reformasi sektor publik melalui pengukuran kinerja secara bertahap, terutama pada sektor pemerintah daerah (*local government*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mahmudi (2010) untuk mengetahui kinerja kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha dan yang bukan pengusaha. Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahmudi (2010) adalah pertama, obyek penelitian yang digunakan Mahmudi adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Kedua, penelitian Mahmudi dilakukan pada tahun anggaran 2005, 2006, dan 2007, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang:

1. Kinerja Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM.
2. Kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibandingkan yang bukan pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM.

B. Tinjauan Pustaka

1. New Public Management

Tujuan NPM adalah memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. Meski penerapan NPM di

berbagai negara cukup beragam, namun tetap mengarah ke tujuan yang sama seperti diharapkan NPM. Bahkan dalam pemilihan kebijakan juga hampir sama, yaitu desentralisasi (*devolved management*), pergeseran dari pengendalian *input* menjadi pengukuran *output* dan *outcome*, spesifikasi kinerja yang lebih ketat, dan pemberian *reward and punishment* yang jelas (Hood, 1991).

Christopher Hood (1991) mengungkapkan tujuh doktrin NPM yang terdiri dari: profesionalisme dalam manajemen sektor publik, standar dan pengukuran yang jelas terhadap kinerja, perhatian lebih terhadap kontrol *output*, pemecahan unit-unit kerja (*disaggregation unit*) di organisasi sektor publik, perubahan menuju peningkatan kompetisi sektor publik, mengadopsi gaya manajemen swasta di sektor publik, dan lebih berdisiplin dan berhemat dalam penggunaan sumber daya.

2. *Reinventing Government*

Reinventing government pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat oleh David Osborne dan Theodore Gaebler pada tahun 1992. *Reinventing government* adalah era baru pengelolaan sektor publik di Amerika setelah meninggalkan sistem birokrasi tradisional. Sehingga semenjak tahun 1992-1997 lebih dikenal sebagai “*reinventing era*” (Cohen dan Eimike, 1998).

Osborne dan Plastrik mengungkapkan bahwa yang dimaksud *reinventing government* adalah transformasi atau perubahan yang mendasar bagi organisasi sektor publik untuk menciptakan peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta kemampuan untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan merubah tujuan, intensif, struktur maupun kultur di lingkungan organisasi sektor publik.

Reinventing Government memiliki sepuluh prinsip utama yaitu, pemerintah katalis; mengarahkan ketimbang mengayuh; pemerintah milik masyarakat; pemerintah yang kompetitif; pemerintah yang digerakkan oleh misi; pemerintah berorientasi hasil; pemerintah berorientasi pelanggan; pemerintah wirausaha; pemerintah antisipatif; pemerintah berorientasi mekanisme (Collins dan Byrne, 2004; Osborne, 1992).

3. Kinerja Pemerintah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu, memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002; 67).

Kinerja Pemerintah dapat ditinjau dari beberapa capaian-capaian, diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis, dan interpretasi data yang akhirnya memberikan kesimpulan berdasarkan pada penelitian data (Sugiyono, 1999: 143). Hasilnya ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek penelitian (Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia. Semenjak kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai tahun 2010, terdapat 33 propinsi di Indonesia dengan jumlah Kabupaten dan Kota sekitar 514.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Di Jawa Tengah terdapat 35 Kabupaten dan Kota, sedangkan D.I. Yogyakarta memiliki 5 Kabupaten dan Kota. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *judgement sampling*. Pengambilan sampel di kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta didasarkan pada ketersediaan dan kemudahan akses data penelitian.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Sementara itu, data latar belakang Kepala Daerah diambil dari Curriculum Vitae masing-masing yang terdapat pada situs Pemda, artikel di koran maupun internet, dan informasi pendukung lainnya. Semua data yang digunakan diteliti selama 3 tahun terakhir yaitu pada 2007, 2008, dan 2009.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini akan mengamati tentang kinerja Kepala Daerah ditinjau dari variabel PAD, PDRB, tingkat kemiskinan dan IPM. Adapun definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan Latar Belakangnya

Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Walikota atau Bupati sebagai pimpinan puncak di pemerintah daerah. Latar belakang Kepala Daerah dikategorikan menjadi Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, pengukuran PAD dilihat dari pertumbuhannya tiap tahun seperti yang dilakukan dalam penelitian Mahmudi (2010) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PertumbuhanPAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}}$$

Keterangan:

PAD_t = PAD tahun anggaran ke-t

PAD_{t-1} = PAD tahun anggaran ke-t-1

t = tahun anggaran

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penelitian ini, perhitungan pertumbuhan PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. Dengan perhitungan ini, akan diketahui pertumbuhan

ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun seperti yang dilakukan dalam penelitian Mahmudi (2010). Untuk itu, rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Pertumbuhan PDRB}_t = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Keterangan:

PDRB_t = PDRB tahun anggaran ke-t

PDRB_{t-1} = PDRB tahun anggaran ke-t-1

t = tahun anggaran

4. Tingkat Kemiskinan

Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan menggunakan definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. BPS menjabarkan pengertian kemiskinan adalah suatu kondisi ketika jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori perkapita. Ukuran tingkat kemiskinan ditunjukkan dengan menggunakan persentase (0-100) sesuai yang dilakukan dalam penelitian Mahmudi (2010).

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), maupun kemampuan ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan angka indeks yang digunakan untuk melihat IPM adalah dari 1 sampai 100. Indeks ini juga telah digunakan dalam penelitian Mahmudi (2010).

Metode Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Hasil dari pengujian ini akan dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih dari 0,05 maka data tersebut terdistribusikan normal (Ghozali, 2005: 110). Setelah diketahui hasil dari pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, maka baru dapat disimpulkan metode pengujian hipotesis penelitian. Apabila data setiap variabel berdistribusi normal, maka

pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik (*independent-samples t-test*), namun apabila data tidak berdistribusi normal maka menggunakan statistik non-parametrik.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan *independent-samples t-test*. Akan tetapi sebelumnya akan dilakukan pengujian homogenitas data. Untuk menguji homogenitas data ditentukan berdasarkan hasil *levene's test* untuk menguji apakah *variance* kedua sampel sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*). Apabila probabilitas $> 0,05$, maka sampel sehingga memiliki *variance* sama, namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka sampel disimpulkan memiliki *variance* berbeda (Ghozali, 2005; 57-58).

Pengujian *independent-samples t-test* digunakan untuk melihat kesamaan rata-rata dan variansi kelompok data pada sebuah sampel independen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kedua kelompok data pada sebuah sampel bersumber dari populasi yang sama atau berbeda. Bila ditemukan berbeda, maka kelompok pada sampel tersebut adalah independen (Amir, 2006; 101).

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0,05. Hasil pengujian hipotesis akan ditentukan apabila nilai signifikansi statistik $t < 0,05$, atau H_0 diterima dan H_a tidak terdukung atau sebaliknya. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 16.

3. Analisis Rumusan Masalah Kedua

Dalam menjawab rumusan masalah kedua tentang Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibanding non-pengusaha ditinjau dari pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM dianalisis dengan membandingkan *mean* dari masing-masing kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil dari statistik deskriptif. Apabila nilai *mean* dari PAD, PDRB, dan IPM menunjukkan hasil yang lebih besar maka dapat disimpulkan memiliki kinerja yang lebih baik. Namun untuk tingkat kemiskinan, nilai *mean* menunjukkan jumlah yang lebih kecil jumlahnya sehingga memiliki kinerja yang lebih baik.

D. Hasil Penelitian

Hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Variabel		<i>p-value</i>	Kriteria	Kesimpulan
PAD <i>Growth</i>	Pengusaha	0,856	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
	Non Pengusaha	0,615	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
PDRB <i>Growth</i>	Pengusaha	0,948	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
	Non Pengusaha	0,242	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
TM	Pengusaha	0,854	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
	Non Pengusaha	0,998	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
IPM	Pengusaha	0,724	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal
	Non Pengusaha	0,734	$p > 0,05$	Data terdistribusiNormal

Sumber: Data Diolah, 2012

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *one-sample kolmogorov smirnov* pada tabel 1 diatas menunjukkan nilai *p-value* untuk masing-masing variabel, baik pengusaha maupun non pengusaha. Untuk variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, TM dan IPM masing-masing menunjukkan nilai *p-value* diatas 0,05 (α) atau $p > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *independent-samples t-test*. Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Independent Sample t-test

Variabel	<i>Levene's test</i>		Uji t		Kesimpulan
	F	<i>p-value</i>	t	<i>p-value</i>	
PAD	4,564	0,039	0,686	0,497	H ₀ diterima
PDRB	0,49	0,826	0,152	0,880	H ₀ diterima
TM	2,652	0,112	-0,515	0,613	H ₀ diterima
IPM	0,120	0,731	1,326	0,200	H ₀ diterima

Sumber: Data Diolah, 2012

Uji kesamaan variansi (*Levene's test*) dilakukan sebagai persyaratan untuk uji t dan ditemukan bahwa melalui uji F variabel PAD menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p = 0,039$

$< 0,05$ (α), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variansi tersebut tidak sama atau berbeda (*equal variances not assumed*).

Variabel PDRB menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p = 0,826 > 0,05$ (α), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kedua variansi tersebut. Variabel TM menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p = 0,112 > 0,05$ (α), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variansi tersebut adalah sama. Variabel IPM menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kedua variansi tersebut dengan nilai *p-value* sebesar $p = 0,731 > 0,05$ (α). Oleh karena itu, variabel PDRB, TM dan IPM menggunakan *equal variances assumed*.

Berdasarkan tabel 2, variabel PAD menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p = 0,497 > 0,05$ (α) sehingga **H₀ diterima** dan H_{a.1} tidak terdukung secara statistik. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi penelitian ini dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang dicapai Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik daripada Kepala Daerah yang berlatar belakang non pengusaha dilihat dari nilai *mean difference* sebesar 0,01590 meskipun secara statistik tidak signifikan.

Variabel PDRB menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p = 0,893 > 0,05$ (α) sehingga **H₀ diterima** dan H_{a.2} tidak terdukung secara statistik. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari PDRB. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kepala daerah yang berlatar belakang non-pengusaha dilihat dari PDRB yang ditunjukkan oleh nilai *mean difference* sebesar 0,00328.

Variabel Tingkat Kemiskinan (TM) menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p = 0,613 > 0,05$ (α) sehingga **H₀ diterima** dan H_{a.3} tidak terdukung secara statistik. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari Tingkat Kemiskinan (TM). Akan tetapi penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kepala daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kepala daerah yang berlatar belakang non pengusaha dilihat dari nilai *mean difference* sebesar -1,20168.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan nilai *p-value* sebesar $p=0,200 > 0,05$ (α) sehingga **H₀ diterima** dan H_{a.4} tidak terdukung secara statistik. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja kepala daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik apabila dibandingkan dengan kepala daerah yang berlatar belakang non pengusaha yang dapat dilihat dari nilai *mean difference* sebesar 1,25128.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian ini belum mampu mendukung penelitian Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM.

Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apakah Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibanding non- pengusaha maka dilakukan analisis sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Kinerja Kepala Daerah

Variabel		N	Mean	Mean Difference
PAD	Pengusaha	13	0,1292	0,1590
	Non Pengusaha	27	0,1133	0,1590
PDRB	Pengusaha	13	4,6808	0,00328
	Non Pengusaha	27	4,7100	0,00328
TM	Pengusaha	13	17,3146	-1,201168
	Non Pengusaha	27	18,5163	-1,201168
IPM	Pengusaha	13	72,7246	1,25128
	Non Pengusaha	27	71,4733	1,25128

Sumber: Data Diolah, 2012

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa 13 Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 27 Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha ditinjau dari nilai *mean* PAD yang dimiliki oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha sebesar 0,1292 lebih besar dari nilai *mean*

PAD yang dimiliki oleh Kepala Daerah non-pengusaha sebesar 0,1133. Adapun nilai *mean difference* PAD menunjukkan angka positif sebesar 0,1590 yang juga mendukung bahwa kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibanding Kepala Daerah non-pengusaha. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian Mahmudi (2010) yang juga menjelaskan bahwa kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibanding non-pengusaha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sumber potensial suatu daerah yang berasal dari PAD dapat diperoleh secara maksimal oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha.

Kinerja Kepala Daerah yang ditinjau dari PDRB menunjukkan hasil yang sama dengan PAD. Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibanding Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *mean* PDRB 13 Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha sebesar 0,4685 lebih besar dari nilai *mean* 27 Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha (0,4652). Sementara itu, nilai *mean difference* PDRB juga menunjukkan angka positif sebesar 0,00328, sehingga Kepala Daerah pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibanding non-pengusaha ditinjau dari PDRB.

Ditinjau dari tingkat kemiskinan, Kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibandingkan dengan Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha. Hal ini dilihat dari nilai *mean* tingkat kemiskinan (TM) pengusaha sebesar 17,3146 lebih kecil dari non-pengusaha yang berjumlah 18,5163 serta nilai *mean difference* variabel tingkat kemiskinan (TM) yang menunjukkan angka negatif yaitu sebesar -0,02923. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang berlatar belakang non-pengusaha lebih besar apabila dibandingkan dengan Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik ditinjau dari segi pengentasan kemiskinan di daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mahmudi (2010) yang juga menemukan bahwa Kepala Daerah Berlatar belakang pengusaha lebih baik ditinjau dari tingkat kemiskinan.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh variabel IPM yang menunjukkan bahwa Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha. Nilai *mean* IPM yang dimiliki oleh 13 Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha sebesar 72,7246 lebih besar dari nilai *mean* IPM 27 Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha sebesar 71,4733. Selain itu, nilai *mean difference* yang menunjukkan angka positif sebesar 1,25128 menunjukkan bahwa kinerja Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik apabila dibandingkan dengan Kepala Daerah berlatar belakang non-pengusaha. Hasil penelitian mengenai kinerja Kepala Daerah ditinjau dari IPM ini konsisten dengan penelitian Mahmudi (2010).

E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya terhadap kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan non-pengusaha ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini ditunjukkan dengan nilai *mean* yang dimiliki Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih besar dibanding non-pengusaha, terkecuali *mean* variabel tingkat kemiskinan.
2. Tidak terdapat perbedaan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang ditinjau dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dengan nilai *p-value* PAD sebesar $p = 0,497 > 0,05$ (α) sehingga H_0 diterima dan $H_{a,1}$ tidak terdukung secara statistik.
3. Tidak terdapat perbedaan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang ditinjau dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). Hal ini ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $p = 0,884 > 0,05$ (α) sehingga H_0 diterima dan $H_{a,2}$ tidak terdukung secara statistik.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang dilihat dari presentase

tingkat kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p -value sebesar $p = 0,613 > 0,05$ (α) sehingga H_0 diterima dan $H_{a,3}$ tidak terdukung secara statistik.

5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini ditunjukkan dengan nilai p -value sebesar $p = 0,200 > 0,05$ (α) sehingga H_0 diterima dan $H_{a,4}$ tidak terdukung secara statistik.

Berikut saran-saran yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama, sehingga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain seperti laporan keuangan, indeks korupsi, jumlah pengangguran, dan lain sebagainya, sehingga dengan begitu dapat menjelaskan kinerja pemerintah yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Muhammad Faisal. 2006. *Mengolah dan Membuat Interpretasi Hasil Olahan SPSS untuk Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Edsa Mahkota.
- Cohen, Steven dan Eimike, William B. 1998. *Trends in 21th Century United States Government Ethics*. Columbia: School of International and Public Affairs.
- Collins, Philip dan Byrne, Liam. 2004. *Reinventing Government Again*. London: The Social Market Foundation. Desember 2004.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance measurement in the public sector: the German experience. *International Journal of Productivity and Performance Management Vol.54 No.7*.
- Hood, C. 1991. *A public Management for All Seasons*. Public Administration, Vol.69: 3-19.
- Hoque, Zahirul and Moll, Jodie. 2001. Public Sector Reform: Implication for Accounting, Accountability and Performance of State-Owned Entities – an Australian Perspective. *The International Journal of Public Sector Management, Vol.14 No.4*.

- Mahmudi. 2010. The Analysis Enterpreneurial Leader on Local Government Performance. *Proceeding SNA XIII Purwokerto, hal 1-24.*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muis, Ichwan. 2012. *Definisi, Penyebab, dan Indikator Kemiskinan*. Artikel Internet. www.ichwanmuis.com diunduh tanggal 06 Januari 2012.
- Nawawi, Hadari, 2000. *Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Di bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Osborne, David. 2007. *Reinventing Government: What a Difference Strategy Makes*. Paper presented at 7th Global Forum of Reinventing Government at Vienna, Austria, 26-29 June 2007.
- Van Mierlo, J.G.A. 1996. *Public Entrepreneurship as Innovative Management Strategy in The Public Sector: A Public Choice-Approach*. Paper presented at the 65th Annual Conference of The Southern Economic Association, Louisiana, USA. November 1995.